





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : CHRISTIAN MAIKEL EMAN
- Jabatan** : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK** : 510834

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.943.628.500
1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 425.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.492.821.000		
3. Tanah Seluas 510.3 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 25.807.500		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	174.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	148.205.341
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.286.133.841
III. HUTANG	Rp.	362.184.312
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.923.949.529

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MAHSUN ASIDQI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 747555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	275.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	82.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	64.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	423.000.000
III. HUTANG	Rp.	306.882.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	116.118.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DEVIE SUSANTI NATHALIE LIMPONG
- Jabatan** : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK** : 694663

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	95.000.000
1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	92.800.000
1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	95.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.780.963
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	307.280.963
III. HUTANG	Rp.	268.203.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	39.077.763

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARNE AGNES RATULANGI
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 104225

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	24.837.125
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	514.556
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	537.801.681
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	537.801.681

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISTIAN ELFIS SUMENDAP
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 993423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	245.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	296.000.000
III. HUTANG	Rp.	68.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	228.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTUA PINONDANG SIMANGUNSONG
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 939567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	100.000.000
1. Tanah Seluas 654 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	134.000.000
III. HUTANG	Rp.	407.122.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-273.122.500

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAUQY HIDAYAH
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 810204

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	165.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	19.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 125 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.440.565
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	205.040.565
III. HUTANG	Rp.	168.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	37.040.565

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEDDY PATTISERLIHUN
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 694761

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **800.020.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA
MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 300.010.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 786 m2/144 m2 di KAB / KOTA
MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.010.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **107.600.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
104.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 14D AL 115 CC Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 3.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **88.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **26.200.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.022.020.000**

III. HUTANG **Rp.** **71.694.044**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **950.325.956**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara